

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RENJA) K/L
BERDASARKAN PAGU ALOKASI TA. 2024
BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

PERUBAHAN 1

Keterangan	UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator	Target	Satuan
		115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI		107	
	PROVINSI & Kab/Kota	5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA		27	
		5245.BAH	Pelayanan Publik Lainnya		1	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan
		5245.BAH.001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses yg dilayani/diproses tepat waktu, netral, dan sesuai dengan SOP oleh Bawaslu Provinsi dan Kab./Kota	1	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan
			Komponen Input :			
Reguler	Provinsi		201 Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran (Provinsi)	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran	1	Laporan
Reguler	Provinsi		202 Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses (Provinsi)	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	1	Laporan
Reguler	kab/kota		301 Koordinasi penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan penanganan dan penindakan pelanggaran.	4	Laporan
Reguler	kab/kota		302 Koordinasi penyelesaian sengketa proses (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses	4	Laporan
		5245.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1	Lembaga, Unit Kerja, Tim
	RPJMN	5245.BDB.001	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif	1	Lembaga, Unit Kerja, Tim
			Komponen Input :			
Reguler	Provinsi		201 Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	Jumlah daerah yang mengembangkan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif	1	Daerah
		5245.BKC	Pemantauan Lembaga		25	Laporan
		5245.BKC.001	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Hasil Pengawasan, Pengawasan Siber dan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	25	Laporan
			Komponen Input :			
Reguler	Provinsi		201 Pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan pemilu partisipatif	1	Laporan
Reguler	Provinsi		202 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI dan Instansi terkait	1	Laporan
Reguler	Provinsi		203 Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	1	Laporan
Reguler	Provinsi		204 Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Provinsi)	Jumlah kegiatan pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	1	Laporan
Reguler	Provinsi		205 Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Provinsi)	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	1	Laporan
Reguler	kab/kota		301 Pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan pemilu partisipatif	4	Laporan
Reguler	kab/kota		302 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Instansi terkait	4	Laporan
Reguler	kab/kota		303 Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	4	Laporan
Reguler	kab/kota		304 Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Kab./Kota)	Jumlah kegiatan pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	4	Laporan
Reguler	kab/kota		305 Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Kab./Kota)	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	4	Laporan
		6661	PERENCANAAN, PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PENYALURAN BERATURAN PENGAWASAN		32	
		6661.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		31	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
		6661.QIC.001	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	Jumlah penyelenggaraan dukungan fasilitasi perencanaan, program dan anggaran tahapan pengawasan pemilu	5	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
			Komponen Input :			

Keterangan	UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator	Target	Satuan
Tahapan Pemilu	Provinsi		201 Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Provinsi)	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	1	Dokumen
Tahapan Pemilu	Provinsi		202 Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu (Provinsi)	Jumlah laporan sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi		203 Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi		204 Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	Jumlah laporan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi		205 Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran (Provinsi)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi		206 Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa (Provinsi)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi		207 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi		208 Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Provinsi)	Jumlah laporan fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Provinsi)	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		301 Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Kab./Kota)	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	4	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		302 Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu (Kab./Kota)	Jumlah laporan sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	4	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		303 Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kab./Kota)	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	4	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		304 Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)	Jumlah laporan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	4	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		305 Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	4	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		306 Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa (Kab./Kota)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	4	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		307 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	4	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		308 Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Kab./Kota)	Jumlah laporan fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Kab./Kota)	4	Laporan
Tahapan Pemilu	Kecamatan		401 Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kecamatan)	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	26	Laporan
Tahapan Pemilu	Kecamatan		402 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kecamatan)	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	26	Laporan
		6661.QIC.003	Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc	Jumlah Laporan Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc	26	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
			<i>Komponen Input :</i>			
Tahapan Pemilu	Kecamatan		402 Rekrutmen Pengawas TPS (Kecamatan)	Jumlah daerah yang melaksanakan rekrutmen pengawas pemilu	2.294	Orang
		6661.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan		1	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan
		6661.UAB.001	Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu	Jumlah layanan pengembangan Sistem Informasi Bawaslu yang terintegrasi	1	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan
			<i>Komponen Input :</i>			
Tahapan Pemilu	Provinsi		201 Pengadaan sarpras pendukung sistem informasi (Provinsi)	Jumlah sarpras pendukung sistem informasi (Provinsi)	6	Unit
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		301 Pengadaan sarpras pendukung sistem informasi (Kab./Kota)	Jumlah sarpras pendukung sistem informasi (Kab./Kota)	0	Unit
		6838	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU OLEH LEMBAGA AD-HOC		8	
		6838.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		8	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
		6838.QIC.001	Honorarium Pengawas Ad-Hoc	Jumlah layanan pembayaran honorarium dan operasional dukungan tahapan pengawasan pemilu oleh lembaga ad-hoc	4	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
			<i>Komponen Input :</i>			
Tahapan Pemilu	Kecamatan		401 Honorarium (Kecamatan)	Jumlah pembayaran honorarium Panwascam	26	Daerah
Tahapan Pemilu	Kelurahan/Desa		501 Honorarium (Kelurahan/Desa)	Jumlah pembayaran honorarium Panwas Kelurahan/Desa	210	Orang
Tahapan Pemilu	TPS		601 Honorarium (TPS)	Jumlah pembayaran honorarium Pengawas TPS	2.294	Orang
Tahapan Pemilu	Luar Negeri		701 Honorarium (Luar Negeri)	Jumlah pembayaran honorarium Panwaslu LN	0	Perwakilan

Keterangan	UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator	Target	Satuan
Tahapan Pemilu	Luar Negeri		801 Honorarium (TPS Luar Negeri dan Kotak Suara Keliling)	Jumlah pembayaran honorarium Pengawas TPS LN dan kotak suara keliling	0	Orang
		6838.QIC.002	Operasional Pengawas Ad-Hoc	Jumlah layanan dukungan Operasional Pengawas Ad-Hoc	4	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
			<i>Komponen Input :</i>			
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		301 Sewa kendaraan operasional (Kab./Kota)	Jumlah pemenuhan operasional sewa kendaraan operasional (Kab./Kota)	4	Lembaga
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		302 Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kab./Kota)	Jumlah pemenuhan operasional sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kab./Kota)	4	Lembaga
Tahapan Pemilu	Kecamatan		402 Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kecamatan)	Jumlah pemenuhan operasional sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kecamatan)	26	Daerah
Tahapan Pemilu	Kecamatan		403 Pemeliharaan gedung/ meubelair/ peralatan (Kecamatan)	Jumlah pemenuhan operasional pemeliharaan gedung/ meubelair/ peralatan (Kecamatan)	26	Daerah
Tahapan Pemilu	Kecamatan		404 Pelayanan operasional perkantoran (Kecamatan)	Jumlah pemenuhan operasional pelayanan operasional perkantoran (Kecamatan)	26	Daerah
Tahapan Pemilu	Kecamatan		405 Santunan Kecelakaan Kerja (Kecamatan)	Jumlah pemenuhan pembayaran Santunan Kecelakaan Kerja (Kecamatan)	26	Orang
		6843	PENGAWASAN MASA KAMPANYE PEMILU		6	
		6843.QCE	Penanganan Perkara		1	Perkara, Berkas Perkara
		6843.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Kampanye	Jumlah perkara yang diterima dan diproses sesuai dengan ketentuan	1	Perkara, Berkas Perkara
			<i>Komponen Input :</i>			
Tahapan Pemilu	Provinsi		201 Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa kampanye (Provinsi)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	1	Berkas Perkara
Tahapan Pemilu	Provinsi		202 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa kampanye (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara
Tahapan Pemilu	Provinsi		203 Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi		204 Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	1	Perkara
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		301 Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	4	Berkas Perkara
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		302 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	4	Perkara
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		303 Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	4	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		304 Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	4	Perkara
		6843.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		5	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
		6843.QIC.001	Pengawasan Masa Kampanye	Jumlah laporan hasil Pengawasan Masa Kampanye	5	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
			<i>Komponen Input :</i>			
Tahapan Pemilu	Provinsi		201 Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi		202 Pengawasan masa kampanye (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa kampanye	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi		203 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		301 Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	4	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		302 Pengawasan masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa kampanye	4	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		303 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	4	Laporan
Tahapan Pemilu	Kecamatan		401 Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Kecamatan)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	26	Laporan
Tahapan Pemilu	Kecamatan		402 Pengawasan masa kampanye (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa kampanye	26	Laporan
Tahapan Pemilu	Kelurahan/Desa		501 Pengawasan masa kampanye (Kelurahan/Desa)	Jumlah laporan pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	210	Laporan
		6845	PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		6	
		6845.QCE	Penanganan Perkara		1	Perkara, Berkas Perkara
		6845.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Pemungutan dan Penghitungan Suara	Jumlah perkara yang diterima dan diproses sesuai dengan ketentuan	1	Perkara, Berkas Perkara
			<i>Komponen Input :</i>			

Keterangan	UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator	Target	Satuan
Tahapan Pemilu	Provinsi		201 Pengelolaan data penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Provinsi)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	1	Berkas Perkara
Tahapan Pemilu	Provinsi		202 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara
Tahapan Pemilu	Provinsi		203 Pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		301 Pengelolaan data penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	4	Berkas Perkara
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		302 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	4	Perkara
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		303 Pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	4	Laporan
		6845.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		5	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
		6845.QIC.001	Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Jumlah laporan hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara	5	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
			<i>Komponen Input :</i>			
Tahapan Pemilu	Provinsi		201 Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi		202 Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi		203 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		301 Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	4	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		302 Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	4	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		303 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	4	Laporan
Tahapan Pemilu	Kecamatan		401 Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kecamatan)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	26	Laporan
Tahapan Pemilu	Kecamatan		402 Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	26	Laporan
Tahapan Pemilu	Kecamatan		403 Pelatihan saksi partai politik (Kecamatan)	Jumlah kegiatan Pelatihan saksi partai politik (Kecamatan)	26	Laporan
Tahapan Pemilu	Kelurahan/Desa		501 Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kelurahan/Desa)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	210	Laporan
Tahapan Pemilu	TPS		601 Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (TPS)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	2.294	Laporan
		6848	PENGAWASAN LOGISTIK		6	
		6848.QCE	Penanganan Perkara		1	Perkara, Berkas Perkara
		6848.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Logistik	Jumlah perkara yang diterima dan diproses sesuai dengan ketentuan	1	Perkara, Berkas Perkara
			<i>Komponen Input :</i>			
Tahapan Pemilu	Provinsi		201 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran logistik (Provinsi)	Jumlah perkara pelanggaran yang ditangani	1	Perkara
Tahapan Pemilu	Provinsi		202 Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		301 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran logistik (Kab./Kota)	Jumlah perkara pelanggaran yang ditangani	4	Perkara
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		302 Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	4	Laporan
		6848.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		5	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
		6848.QIC.001	Pengawasan Logistik	Jumlah laporan hasil Pengawasan Logistik	5	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
			<i>Komponen Input :</i>			
Tahapan Pemilu	Provinsi		201 Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi		202 Pengawasan logistik (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan pengadaan dan distribusi logistik	1	Laporan

Keterangan	UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator	Target	Satuan
Tahapan Pemilu	Provinsi		203 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan logistik (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi sentra gakkumdu	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		301 Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	4	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		302 Pengawasan logistik (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan pengadaan dan distribusi logistik	4	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		303 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan logistik (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi sentra gakkumdu	4	Laporan
Tahapan Pemilu	Kecamatan		401 Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kecamatan)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	26	Laporan
Tahapan Pemilu	Kecamatan		402 Pengawasan logistik (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan distribusi logistik	26	Laporan
Tahapan Pemilu	Kelurahan/Desa		501 Pengawasan logistik (Kelurahan/Desa)	Jumlah laporan pengawasan distribusi logistik	210	Laporan
Tahapan Pemilu	TPS		601 Pengawasan logistik (TPS)	Jumlah laporan pengawasan distribusi logistik	2.294	Laporan
		6844	PENGAWASAN MASA TENANG		6	
		6844.QCE	Penanganan Perkara		1	Perkara, Berkas Perkara
		6844.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Tenang	Jumlah perkara yang diterima dan diproses sesuai dengan ketentuan	1	Perkara, Berkas Perkara
			<i>Komponen Input :</i>			
Tahapan Pemilu	Provinsi		201 Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa tenang (Provinsi)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	1	Berkas Perkara
Tahapan Pemilu	Provinsi		202 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa tenang (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara
Tahapan Pemilu	Provinsi		203 Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa tenang (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi		204 Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa tenang (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	1	Perkara
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		301 Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	4	Berkas Perkara
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		302 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	4	Perkara
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		303 Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	4	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		304 Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa tenang (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	4	Perkara
		6844.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		5	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
		6844.QIC.001	Pengawasan Masa Tenang	Jumlah laporan hasil Pengawasan Masa Tenang	5	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
			<i>Komponen Input :</i>			
Tahapan Pemilu	Provinsi		201 Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi		202 Pengawasan masa tenang (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa tenang	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi		203 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa tenang (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		301 Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	4	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		302 Pengawasan masa tenang (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa tenang	4	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		303 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa tenang (Kab./Kota)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	4	Laporan
Tahapan Pemilu	Kecamatan		401 Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang (Kecamatan)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	26	Laporan
Tahapan Pemilu	Kecamatan		402 Pengawasan masa tenang (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa tenang	26	Laporan
Tahapan Pemilu	Kelurahan/Desa		501 Pengawasan masa tenang (Kelurahan/Desa)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa tenang	210	Laporan
		6846	PENGAWASAN PENETAPAN HASIL PEMILU		6	
		6846.QCE	Penanganan Perkara		1	Perkara, Berkas Perkara
		6846.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Penetapan Hasil Pemilu	Jumlah perkara yang diterima dan diproses sesuai dengan ketentuan	1	Perkara, Berkas Perkara
			<i>Komponen Input :</i>			
Tahapan Pemilu	Provinsi		201 Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Provinsi)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	1	Berkas Perkara
Tahapan Pemilu	Provinsi		202 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		301 Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	4	Berkas Perkara
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota		302 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	4	Perkara
		6846.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		5	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur

Keterangan	UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator	Target	Satuan
		6846.QIC.001	Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu	Jumlah laporan hasil Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu	5	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
			<i>Komponen Input :</i>			
Tahapan Pemilu	Provinsi	201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan hasil pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi	202	Pengawasan penetapan hasil pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan penetapan hasil pemilu	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi	203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan hasil pemilu (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Provinsi	204	Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan penetapan hasil pemilu	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	4	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota	302	Pengawasan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan penetapan hasil pemilu	4	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota	303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	4	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota	304	Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan penetapan hasil pemilu	4	Laporan
Tahapan Pemilu	Kecamatan	401	Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Kecamatan)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	26	Laporan
		6847	PENGAWASAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI		10	
		6847.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		10	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
		6847.QIC.001	Publikasi Pengawasan Sumpah Janji	Jumlah laporan publikasi Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	5	Laporan
			<i>Komponen Input :</i>			
Tahapan Pemilu	Provinsi	201	Publikasi dan dokumentasi pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	4	Laporan
		6847.QIC.002	Pengawasan Pengucapan Sumpah Janji	Jumlah laporan hasil Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	5	Laporan
			<i>Komponen Input :</i>			
Tahapan Pemilu	Provinsi	201	Pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	1	Laporan
Tahapan Pemilu	Kabupaten/Kota	301	Pengawasan pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	4	Laporan
		115.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		222	
		4355	PEMERIKSAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN INTERNAL		5	
		4355.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		5	Dokumen, Layanan, Laporan
		4355.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja		5	Dokumen, Layanan, Laporan
			<i>Komponen Input :</i>			
Reguler	Provinsi	201	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan layanan	1	Dokumen
Reguler	Kab/kota	301	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan layanan	4	Dokumen
		4356	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI		10	
		4356.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		10	Layanan, Laporan, Dokumen
		4356.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu		5	Layanan, Laporan, Dokumen
			<i>Komponen Input :</i>			
Reguler	Provinsi	201	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi	1	Laporan

Keterangan	UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator	Target	Satuan
Reguler	Kab/kota		301 Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi	4	Laporan
		4356.EBA.963	Layanan Data dan Informasi		5	Layanan, Laporan, Dokumen
			Komponen Input :			
Reguler	Provinsi		201 Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik yang tersedia	1	Laporan
Reguler	Kab/kota		301 Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan dan pengembangan PPID	4	Laporan
		6849	PENGLOLAAN KEUANGAN, BMN, DAN UMUM		26	
		6849.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		6	Layanan, Laporan, Dokumen
		6849.EBA.956	Layanan BMN		5	Layanan, Laporan, Dokumen
			Komponen Input :			
Reguler	Provinsi		201 Pembinaan dan pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pembinaan dan pengelolaan BMN yang sesuai dengan ketentuan	1	Laporan
Reguler	Kab/kota		301 Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan inventarisasi aset	4	Laporan
		6849.EBA.994	Layanan Perkantoran		1	Layanan, Laporan, Dokumen
			Komponen Input :			
Reguler	1. Pusat; 2. Provinsi; 3. Kab/Kota		001 Gaji dan tunjangan	Jumlah Unit Kerja pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	1	
Reguler	1. Pusat; 2. Provinsi; 3. Kab/Kota		002 Operasional dan pemeliharaan kantor	Persentase penyelesaian pembayaran gaji pegawai kontrak yang tepat waktu	1	
		6849.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		0	Unit, M2, Paket
		6849.EBB.951	Layanan Sarana Internal		0	Unit, M2, Paket
			Komponen Input :			
Reguler	Provinsi		202 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	0	Unit
Reguler	Provinsi		203 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	0	Unit
Reguler	Kab/kota		302 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	0	Unit
Reguler	Kab/kota		303 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	0	Unit
		6849.EBB.971	Layanan Prasarana Internal		0	Unit, M2, Paket
			Komponen Input :			
Reguler	Provinsi		201 Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Provinsi	Jumlah pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	0	Unit
Reguler	Kab/kota		301 Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	0	Unit
		6849.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		20	Dokumen, Layanan, Laporan
		6849.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		5	Dokumen, Layanan, Laporan
			Komponen Input :			
Reguler	Provinsi		201 Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	1	Dokumen
Reguler	Kab/kota		301 Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	4	Dokumen
		6849.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		5	Dokumen, Layanan, Laporan
			Komponen Input :			
Reguler	Provinsi		201 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	1	Dokumen
Reguler	Kab/kota		301 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	4	Dokumen
		6849.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		5	Dokumen, Layanan, Laporan
			Komponen Input :			
Reguler	Provinsi		201 Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan	1	Dokumen
Reguler	Kab/kota		301 Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan	4	Dokumen
		6849.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Bawaslu		5	Dokumen, Layanan, Laporan
			Komponen Input :			
Reguler	Provinsi		201 Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	1	Dokumen

Keterangan	UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator	Target	Satuan
Reguler	Kab/kota		301 Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	4	Dokumen
		6850	PENGLOLAAN ORGANISASI DAN SDM		181	
		6850.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		15	Layanan, Laporan, Dokumen
		6850.EBA.957	Layanan Hukum		5	Layanan, Laporan, Dokumen
			<i>Komponen Input :</i>			
Reguler	Provinsi		201 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1	Laporan
Reguler	Provinsi		202 Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi	Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	1	Laporan
Reguler	Provinsi		203 Kajian hukum di Bawaslu Provinsi	Laporan kajian hukum	1	Laporan
Reguler	Kab/kota		301 Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan produk hukum dan layanan hukum	4	Laporan
Reguler	Kab/kota		302 Kajian hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Laporan kajian hukum	4	Laporan
		6850.EBA.962	Layanan Umum		5	Layanan, Laporan, Dokumen
			<i>Komponen Input :</i>			
Reguler	Provinsi		201 Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi	Jumlah kegiatan fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi	1	Laporan
Reguler	Kab/kota		301 Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota	4	Laporan
		6850.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum		5	Layanan, Laporan, Dokumen
			<i>Komponen Input :</i>			
Reguler	Provinsi		201 Pendampingan dan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1	Laporan
Reguler	Provinsi		202 Pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	1	Laporan
Reguler	Kab/kota		301 Bantuan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	4	Laporan
		6850.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		166	Orang, Layanan
		6850.EBC.954	Layanan Manajemen SDM		166	Orang, Layanan
			<i>Komponen Input :</i>			
Reguler	Provinsi		201 Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi	Jumlah aparatur pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan	53	Orang
Reguler	Kab/kota		301 Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan	113	Orang
TOTAL						

